

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang juga mempunyai peran sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang wajib menyelenggarakan pembukuan maupun pencatatan akuntansi PPN terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak melalui pelaksanaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Namun dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai masih terdapat masalah yang timbul akibat adanya perbedaan kuantitas khususnya pupuk urea non subsidi saat pengiriman Barang Kena Pajak melalui Kantor PPD Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif yaitu dengan metode studi kasus. Obyek di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PPD Jawa Timur).

Penerapan akuntansi PPN pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang secara garis besar sudah cukup baik, namun belum optimal khususnya penggunaan SKBDN. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah memberikan penangguhan pembayaran atas penjualan pupuk urea non subsidi kepada konsumen melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yaitu bentuk jaminan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas nama nasabah yang telah memberikan kuasa kepada penjual (*beneficiary*) untuk menarik sejumlah uang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SKBDN tersebut.

Kata Kunci: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), FOB (*free on board*), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Pajak Keluaran